

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui tujuan Pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dalam kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Selain itu pajak daerah dan retribusi daerah diadakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah.

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu

sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun-tahun terus meningkat. Semua ini terlihat juga pada penelitian milik Septian Dwi Kurniawan dengan judul skripsinya “Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo”. Penelitian tersebut salah satu hasilnya adalah bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan bedanya dengan penelitian saya adalah terletak pada objek penelitian, yaitu saya mengambil di Provinsi Jawa timur dengan periode 2010-2011.

Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun komponen-komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dicari jawaban maupun solusinya, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Apakah ada pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur ?

2. Apakah ada pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah ada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penulisan skripsi ini diantara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini di harapkan dapat:

- 1) Menemukan konsep pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.
- 2) Dapat dijadikan bahan rujukan oleh penulis atau peneliti lain jika hendak menulis atau melakukan penelitian hal yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Mahasiswa dan/atau instansi yang memerlukan data atau informasi terkait dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.